



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DINAS
KETAHANAN
PANGAN
PERTANIAN DAN
PERIKANAN








KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang Tanaman Pangan	
Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan	
Kepala Bidang Perikanan	
Kepala Bidang Penyuluhan	
Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Majalengka, 28 Februari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Majalengka





KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Berikut kedudukan tugas fungsi dan bagan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dinas daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka.

a. Kedudukan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

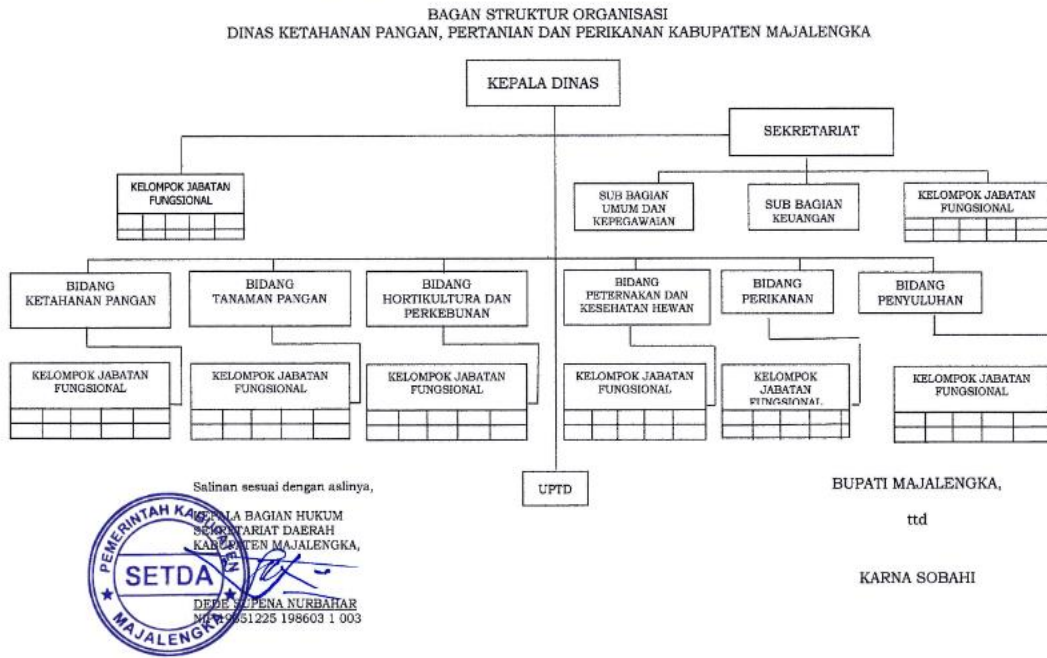
1. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan; dan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka terdiri atas :

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi
 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA



1.2. Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 353 orang dengan rincian sebagai berikut:

INFOGRAFIK ASN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Laki-laki

187 Orang



Perempuan

166 orang



Eselon



II B 1

III A 1

III B 6

IV A 5

IV B 4

II

57

III

114

IV

24

PNS

II

35

III

123

PPPK



Golongan

Jenis Jabatan



STRUKTURAL

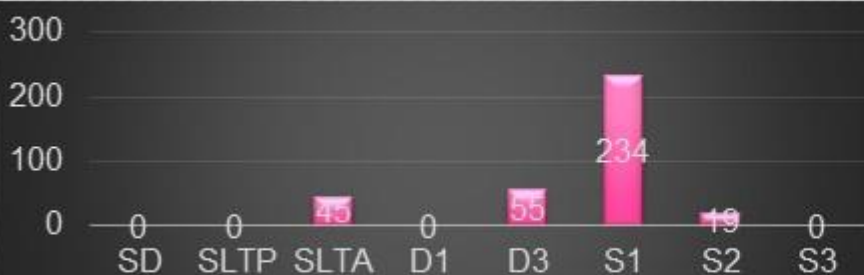
16

PELAKSANA

32

FUNGSIONAL

304



Pendidikan

1.3. Isu Strategis

Sektor Pangan Pertanian dan Perikanan sebagai salah satu potensi strategis yang dimiliki oleh Kabupaten Majalengka, tentu memegang peranan yang penting serta tidak terpisahkan dari upaya pembangunan. Paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya menjadi berbasis pengelolaan sumberdaya berkelanjutan (*sustainable resource management*) telah menunjukkan pentingnya peranan pembangunan sektor Pangan Pertanian dan Perikanan sehingga perlu mendapatkan prioritas tempat dalam dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator sekaligus motivator dan dinamisator dalam menggerakkan roda pembangunan, khususnya dalam mewujudkan Ketahanan Pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian dan Perikanan. Dengan demikian, proses pembenahan yang terus menerus terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menjadi sebuah keharusan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan.

Isu strategis pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Majalengka meliputi :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan perekonomian.
2. Peningkatan kualitas dan kontinuitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan global.
3. Pencegahan dan penanggulangan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan hama penyakit ikan.
4. Penyediaan benih dan bibit pertanian dan perikanan yang unggul.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.
6. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan.
7. Perbaikan kondisi dan peningkatan kualitas lahan pertanian dan kolam perikanan.
8. Optimalisasi kinerja UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH), Balai Benih Pengembangan Produksi Ikan (BBPPI), Pasar Ternak

Regional dan Rumah Potong Hewan (PTR dan RPH) dan Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (BPPPT)

9. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pertanian dan perikanan.
10. Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perikanan yang berwawasan lingkungan.
11. Penurunan tingkat kehilangan hasil pertanian dan perikanan.
12. Peningkatan akses permodalan bagi petani.
13. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
14. Pemetaan Potensi Sumber Daya pertanian dan perikanan meliputi potensi lahan, air, SDM, serta komoditas yang sesuai untuk dikembangkan.
15. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
16. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal, diperlukan upaya untuk penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
17. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (*nutrition sensitive production system*).
18. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah perlu adanya pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah.
19. Rawan pangan bukan semata urusan pangan, tetapi lebih luas seperti : kemiskinan, akses listrik, akses air bersih, tamat SD, Stunting, akses jalan untuk roda empat, buta huruf serta kematian ibu melahirkan dan anak lahir.
20. Masih tingginya impor bahan pangan (daging, beras, dan hortikultura).
21. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen terhadap keamanan pangan baik pangan segar maupun pangan olahan.
22. Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan, sehingga menyebabkan ketidakstabilan harga.
23. Rendahnya citra pangan lokal.
24. Intensitas pembangunan sektor non pertanian sangat tinggi.

25. Masih besarnya proporsi Masyarakat Miskin.
26. Beralih fungsi lahan diantaranya konversi lahan produktif ke penggunaan non pertanian terjadi secara masif sehingga terjadi kompetisi pemanfaatan lahan non pangan.
27. Keterbatasan sumber daya manusia penyuluh pertanian.
28. Minat masyarakat untuk bertani yang semakin menurun dan rendahnya keterlibatan generasi muda.
29. Masih rendahnya kemampuan petani dalam produktivitas, kualitas, daya saing, berkesinambungan, ketersediaan air, nilai tambah, pengolahan dan kelembagaan kelompok tani.
30. Rendahnya perlindungan terhadap petani.
31. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas.
32. Belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi – umbian lokal dan pengembangan aneka olahan pangan lokal.
33. Peningkatan kompetensi penyuluh dengan cara meningkatkan jumlah penyuluh yang bersertifikat, sehingga kualitas pelayanan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha meningkat.
34. Makin berkurangnya jumlah penyuluh PNS.
35. Melengkapi sarana prasarana penyuluhan.
36. Peningkatan kelas kelompok tani dalam rangka mempercepat kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha.
37. Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi petani;

Guna mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara maka terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan

bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka serta SK Tim Penyusunan LKIP.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Mengacu kepada Visi Kabupaten Majalengka **“Mewujudkan Tataan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA”**, maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 mengemban tugas mendukung pencapaian Misi “Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani” dengan tujuan “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing”.

Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2023 maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, dengan indikator Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat yang aman dikonsumsi.
- b. Tujuan Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing melalui pembangunan pertanian, dengan indikator Tercapainya target peningkatan produktivitas pertanian.

Dalam rangka pengukuran pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran dan indikator sasaran pembangunan tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Sasaran : Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian
Indikator : Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1,75 %
- b. Sasaran : Meningkatnya akses pangan
Indikator : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 90,15 Poin

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan :

Tabel 1.1.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat	Tersedianya kebutuhan pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Laporan ketersediaan harga dan pasokan pangan	Persen	100	100	100	100	100	
			Peningkatan skor PPH	Poin	0,41	,41	0,50	0,50	0,50	
			Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	Persen	100	100	100	100	100	
			Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)	Desa	4	4	4	4	4	
		Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Poin	0	0	0	0	0	90,15
2	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing melalui pembangunan perikanan	Meningkatnya produksi perikanan yang bersinergi dengan peningkatan ekonomi pelaku usaha perikanan	Jumlah total produksi perikanan budidaya kabupaten	Persen					2	
			Jumlah omset pemasaran produk perikanan	Persen					10	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
3	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing melalui pembangunan pertanian	Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen					85	
			Peningkatan Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen					1,75	
			Peningkatan ketersediaan daging, telur dan susu per tahun	Persen					2,3	
			Persentase ketersediaan prasarana pertanian	Persen					65	
			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen					1	
			Penjaminan keamanan pangan asal hewan	Ekor					800	
			Luas lahan pertanian yang terfasilitasi penanggulangan	Hektar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
			bencana pertanian							
			Tingkat kunjungan penyuluh pertanian	Persen	100	100	100	100	100	
			Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Persen	0	0	0	0	0	1,75

Perjanjian Kinerja (Perkin) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebelum perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Tersedianya kebutuhan pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%
		Laporan ketersediaan harga dan pasokan pangan	100%
		Peningkatan skor PPH	0,50
		Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis	100%
		Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan)	4 Desa
2	Meningkatnya produksi perikanan yang bersinergi dengan peningkatan ekonomi pelaku usaha perikanan	Jumlah total produksi perikanan budidaya kabupaten	2%
		Jumlah omset pemasaran produk perikanan	10%
3	Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	85%
		Peningkatan Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1,75%
		Peningkatan ketersediaan daging, telur dan susu per tahun	2,3%
		Persentase ketersediaan prasarana pertanian	65%
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1%
		Penjaminan keamanan pangan asal hewan	800 Ekor
		Luas lahan pertanian yang terfasilitasi penanggulangan bencana pertanian	5.000 Hektar
		Tingkat kunjungan penyuluh pertanian	100%

Setelah dilaksanakan pendampingan asistensi penyelarasan Pohon Kinerja (Pokin) Tahun 2023 serta setelah ditetapkannya perubahan anggaran Tahun 2023 maka ditetapkan Perjanjian Kinerja (Perkin) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,75 %
2	Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,15 Poin

Perubahan indikator secara esensi lebih bisa diukur dan mewakili capaian DKP3. Sebanyak 2 IKU yang ditetapkan, lebih dapat berorientasi pada hasil capaian kinerja DKP3.

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari :

Tabel 2.4.

Daftar Program dan Rencana Anggaran Tahun 2023

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.281.810.044	49,812
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	147.500.000	0,251
Penanganan Kerawanan Pangan	38.000.000	0,065
Pengelolaan Perikanan Budidaya	217.192.400	0,370
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	86.280.000	0,147
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.102.425.212	8,680
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.269.220.400	37,880
Pengendalian Kesehatan Hewan	301.150.000	0,512

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	45.000.000	0,077
Penyuluhan Pertanian	1.295.480.000	2,200
JUMLAH	58.784.058.056	100,00

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 Sasaran dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100%. Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 100%, dan 1 indikator lainnya mencapai kinerja 104,94%:

Capaian IKU (%)





PERSENTASE KENAIKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS LAHAN



FAKTOR KEBERHASILAN

- Bantuan prasarana
- Bantuan benih
- Sosialisasi CPIB dan CBIB
- Pelatihan pelaku usaha
- Pemantauan penyakit hewan
- Penanganan serangan OPT
- Promosi produk pertanian
- Pemeliharaan sarana prasarana

PROGRAM

- Program pengelolaan perikanan budidaya
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Program penyuluhan pertanian

EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini sebesar 4,65%.



Sasaran Strategis 1 Indikator 1
Meningkatnya produktivitas (*on farm*) dan daya serap (*off farm*)
komoditas pertanian

1) Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Tabel 3.8.
 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja
 Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,75 %	1,75%	100%

Produksi adalah suatu metode yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia (Ahyar, 2002). Produktivitas adalah rasio dari total output dengan input yang dipergunakan dalam produksi (Heady, 2002). Selanjutnya Heady (2002) menjelaskan bahwa berkenaan dengan lahan, produktivitas lahan berkesesuaian dengan kapasitas lahan untuk menyerap input produksi dan menghasilkan output dalam produksi pertanian.

Lahan adalah salah satu faktor produksi, tempat dihasilkannya produk pertanian yang memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap usaha tani, karena banyak sedikitnya hasil produksi dari usaha tani sangat dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan (Mubyarto, 1989).

Sasaran strategis “Meningkatnya produktivitas (*on farm*) dan daya serap (*off farm*) komoditas pertanian” dengan indikator kinerja “Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan” dari target yang ditetapkan yaitu 1,75% terealisasi sebesar 1,75% atau capaian kinerja sebesar 100 %.

Pencapaian realisasi capaian kinerja sebesar 100% tersebut diperoleh melalui dilaksanakannya beberapa kegiatan antara lain :

- a) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil , yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pencegahan stunting sekaligus pemberian godybag produk perikanan kepada TP PKK Kecamatan dan DWP dengan total godybag 252 paket, yang dilaksanakan dengan sasaran Tersosialisasinya pencegahan stunting pada 26 PKK Kecamatan dan DWP, Terasilitasinya pendampingan 5 pelaku usaha dalam penguatan

kelembagaan dan pemasaran hasil perikanan, yang dilaksanakan oleh Tim penggerak PKK dan DWP PKK di 26 Kecamatan.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- b) Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dalam bentuk pengecetan Depo Ikan Sindangwangi, terfasilitasinya upah tenaga kebersihan selama 12 bulan, yang dilaksanakan dengan sasaran terfasilitasinya sarana pelaku usaha perikanan sebanyak 5 pelaku usaha, yang dilaksanakan dengan berlokasi Depo Ikan Sindangwangi. Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- c) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, yang dilaksanakan dalam bentuk terfasilitasinya pakan ikan baung sebanyak 1200 kg, yang

dilaksanakan dengan sasaran terfasilitasinya sarana pelaku usaha perikanan sebanyak 10 pelaku usaha, yang dilaksanakan dengan berlokasi di Desa Sindangwangi Kecamatan Sindangwangi.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- d) Kegiatan pembangunan prasarana pertanian, yang dilaksanakan di 81 Kelompok Tani sebagai Pokmas penyelenggara swakelola di 81 Desa pada 25 Kecamatan di Kabupaten Majalengka dengan volume pajang jalan usaha tani sesuai RAB/ kondisi di masing-masing lokasi, yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kelancaran mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi pertanian dan kegiatan lainnya dari dan ke lahan pertanian, yang dilaksanakan.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- e) Kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dalam bentuk memberikan bantuan berupa benih jagung hibrida sebanyak 750 kg kepada 10 kelompok tani masing-masing 75 kg, yang dilaksanakan dengan sasaran terfasilitasinya sarana produksi pertanian dan tersalurkannya bantuan benih jagung untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan serta

mendukung peningkatan ekspor di 10 Desa dari 3 Kecamatan di Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- f) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dalam bentuk belanja obat-obatan Rodentisida sebanyak 150 kg untuk pengendalian OPT di lapangan, yang dilaksanakan dengan sasaran tersedianya sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tersalurkannya bantuan pengendalian OPT berupa Insektisida dan Rodentisida untuk pengamanan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman khususnya padi di Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- g) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dalam bentuk belanja cetak (fotocopy 500 lembar, jilid 6 buku), bahan kimia (Herbisida 25 liter NPK non subsidi 250 kg, pupuk organik padat 210 kg); HOK pekerjaan harian lepas 144 OH), yang dilaksanakan dengan sasaran terpeliharanya tanaman di kebun dinas dengan

komoditas unggulan perkebunan, yang dilaksanakan dengan berlokasi di Maja dan Lemahsugih.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



h) Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, yang dilaksanakan dalam bentuk belanja cetak (fotocopy 1150 lembar, jilid 7 buku, jilid juknis 6 buku); bahan kimia (NPK 600 kg, pupuk organik padat 700 kg); bahan benih/bibit tanaman (benih cabai rawit hijau 400 gram, benih cabai merah besar 400 gram, benih terong 400 gram, bibit belimbing 400 pohon, bibit jambu air 400 pohon, bibit jambu kristal 400 pohon, bibit mangga 400 pohon) , yang dilaksanakan dengan sasaran pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan sarana pertanian untuk rumah tangga miskin anggota P2WKSS, yang dilaksanakan dengan berlokasi di Desa Lemahsugih, Kecamatan Lemahsugih.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



i) Kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan dalam bentuk Belanja cetak (Pelaporan 500.000); Bahan Benih/Bibit Tanaman (Benih Bawang merah 5000 Kg), Belanja Handsprayer 30 unit, yang dilaksanakan dengan sasaran peningkatan produktivitas pertanian di

kawasan hortikultura dengan target kelompok tani hortikultura, yang dilaksanakan dengan berlokasi di kampung hortikultura Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- j) Kegiatan pembangunan prasarana pertanian, yang dilaksanakan dalam bentuk pengadaan 22 unit Jaringan Irigasi Tersier secara swakelola, 1 unit jaringan irigasi tersier secara kontraktual, dan 1 unit Perpipaian secara kontraktual, yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan air pada lahan pertanian sebanyak 24 lokasi, yang dilaksanakan dengan berlokasi di Kecamatan Palasah (Desa Sindanghaji Kelompok Tani Karangbikas, Desa Trajaya Kelompok Tani Kebon Beruk), Kecamatan Sumberjaya (Desa Sepat Gabungan Kelompok Tani Sri Rahayu, Desa Panyingkiran Gabungan Kelompok Tani Sejahtera, Desa Banjaran Kelompok Tani Carang Pinggan), Kecamatan Leuwimunding (Desa Mindi Kelompok Tani Sawah Lega, Desa Nangerang Kelompok Tani Karamat), Kecamatan Rajagaluh (Desa Sadomas Kelompok Tani Masgur, Desa Cipinang Kelompok Tani Bunut, Desa Babakankareo Kelompok Tani Sipuntung), Kecamatan Kertajati (Desa Pakubeureum Kelompok Tani Nyalindung II, Desa Kertajati Kelompok Tani Bengkok), Kecamatan Jatiwangi (Desa Leuweung Gede Kelompok Tani Jangkar, Desa Mekarsari Kelompok Tani Kedokan Daon), Kecamatan Majalengka (Desa Kawunggirang Kelompok Tani Sawah Lega), Kecamatan Panyingkiran (Desa Bonang Kelompok Tani Bibit, Desa Karyamukti Kelompok Tani Wanahayu), Kecamatan Kadipaten (Desa Cipaku Kelompok tani Pasir), Kecamatan Sukahaji (Desa Cikoneng Kelompok Cibadak), Kecamatan Sindang (Desa Gunungkuning Gabungan Kelompok Tani Putra Mandiri), Kecamatan Sindangwangi (Desa Buah Kapas Kelompok Tani Taneh Berem), Kecamatan Lemahsugih (Desa

Mekarwangi Kelompok Tani Bantarmerak III), Kecamatan Argapura (Desa Sukasari Kaler Kelompok Tani Teja Permana, Desa Sadasari Kelompok Tani Sri Mulya 2).

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



k) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan penjaminan peredaran benih/bibit ternak, yang dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi sarana pendukung petugas untuk pelayanan kepada peternak, yang terdiri dari (safety boot (15 pasang), Raincoat (15 buah), plastic Glove (75 pak), obat-obatan ternak untuk optimalisasi reproduksi ternak (1 paket) dan administrasi pelaporan (fotocopy), kegiatan Inseminasi Buatan untuk ternak-ternak ruminasia (sapi potong dan sapi perah) di 26 kecamatan dan diharapkan terjadi kebuntingan dan kelahiran ternak sapi lebih kurang 1000 ekor, yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya populasi dan produksi hasil peternakan 2,5% dengan uraian jumlah kelahiran sapi sebanyak 1000 ekor.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- 1) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan ternak ayam untuk RTM dengan jumlah bibit ternak sebanyak 360 ekor (80 ekor bibit ayam kampung/ayam pelung umur 1-2 bulan grade 3 dan 280 ekor bibit ayam kampung/ayam pelung umur 1-2 bulan grade 2), tiap RTM mendapatkan 9 ekor (2 ekor ayam jantan dan 7 ekor ayam betina), yang dilaksanakan dengan berlokasi di 40 RTM yang memelihara ternak ayam kampung (20 RTM di Desa Sukadana dan 20 RTM lainnya di Desa Buninagara).

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :





m) Kegiatan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner, yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian obat-obatan hewan 2 paket, yang dilaksanakan dengan sasaran tersedianya pelayanan jasa medik veteriner , yang dilaksanakan dengan berlokasi di Puskesmas Jatitujuh dan Puskesmas Maja.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



n) Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, yang dilaksanakan dalam bentuk tersalurkannya paket data ke 26 BPP kecamatan, terselenggaranya pelatihan pertanian tematik pada Bulan Juli 2022 yang diikuti oleh 30 orang peserta di setiap kecamatan yang terdiri dari penyuluh pertanian kecamatan dan kelompok tani,

terselenggaranya sosialisasi geopasial pada Bulan Oktober 2023, yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan pertanian, yang dilaksanakan dengan berlokasi di 26 BPP Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- o) Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan transport untuk penyuluh pertanian dan petugas POPT yang dibayarkan sebanyak 6 kali pertemuan perbulannya untuk bulan Januari sampai September dan 9 kali pertemuan perbulannya untuk bulan November sampai Desember, yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan pertanian di 26 BPP Kecamatan.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- p) Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan sub kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota , yang dilaksanakan dalam bentuk belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan untuk pengelola pembenihan ikan dan babad rumput sebanyak 4 orang, pengadaan pakan induk sebanyak 4.820 kg, pupuk kandang sebanyak 7.000 kg, herbisida sebanyak 8 liter, semen sebanyak

16 zak dan pasir pasang sebanyak 6m³, pengadaan calon induk ikan lele 2 paket dan ikan mas 31 kg, yang dilaksanakan dengan sasaran fasilitasi sarana prasarana budidayaikan selama 12 bulan di UPT BBPPI DKP3. Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



q) Kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan produksi hewan ternak dan pengobatan hewan ternak, yang dilaksanakan dengan sasaran tercapainya angka kelahiran sapi dengan mutu genetik yang baik 20 ekor yang dilaksanakan di UPT BPPPT Babakan Jawa. Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :





- r) Kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan dalam bentuk budidaya penangkaran benih padi dan produksi benih padi, yang dilaksanakan dengan sasaran terfasilitasinya sarana produksi pertanian di Desa Liangjulung dan Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- s) Kegiatan pembangunan prasarana pertanian, yang dilaksanakan dalam bentuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor dan belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan, yang dilaksanakan dengan sasaran terselenggaranya kegiatan pembangunan prasarana pertanian, yang dilaksanakan dengan berlokasi di Dawuan, Bojong Cideres.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.9.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022
Indikator Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,75%	1,75%	-

Tabel 3.10.

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dan Tahun 2022
Indikator Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	100%	100%	-

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan realisasi indikator sasaran strategis antara tahun 2023 dengan tahun 2022 diperoleh hasil bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 1,75% tidak mengalami

peningkatan/penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 1,75%.

Adapun berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan capaian indikator sasaran strategis antara tahun 2023 dengan tahun 2022 diperoleh hasil bahwa capaian tahun 2023 sebesar 100% tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.11.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra
Indikator Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,75%	1,75	100%

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan realisasi indikator sasaran strategis pada tahun 2023 dengan target akhir Renstra diperoleh hasil bahwa realisasi pada tahun 2023 adalah 100 % dari target akhir Renstra, dengan demikian realisasi tahun 2023 tidak kurang/lebih dari target akhir Renstra.

Dengan realisasi tahun 2023 tidak kurang/lebih dari target akhir Renstra maka bagi penyusunan perencanaan Pembangunan tahap selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan angka target indikator kinerja sasaran perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang mencakup produktivitas, kualitas kerja, kemampuan kerja, ketepatan waktu.

4) Perbandingan Realisasi 2023 dengan Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional

Tabel 3.12.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Rata-Rata/Standar
Provinsi/Nasional Indikator Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya produktivitas (<i>on</i>	Persentase Kenaikan Produksi	1,75%	-	Tidak bisa dibandingkan

<i>farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	dan Produktivitas Lahan			
--	-------------------------	--	--	--

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional diperoleh hasil bahwa realisasi tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional, karena tidak ada data yang tersedia.

5) Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya
Kegiatan di PI, sub kegiatan pokin, upaya yang akan dilakukan sesuaikan dengan pokin 2024

Dari hasil tersebut dapat dirumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Tersalurkannya bantuan prasarana kepada 10 pelaku usaha perikanan budidaya
- 2) Tersalurkannya bantuan benih kepada 10 pelaku usaha perikanan budidaya
- 3) Tersosialisasikannya CPIB dan CBIB sebesar 1%
- 4) Terlatihnya 5 pelaku usaha perikanan tentang diversifikasi produk dan olahan hasil perikanan
- 5) Tersosialisasikannya gerakan makan ikan pada event tingkat kabupaten kepada 252 orang
- 6) Terpantaunya potensi penyakit ikan pada 4 kolam
- 7) Tertanganinya kasus penyakit ikan sebesar 1%
- 8) Terbinanya 18.540 pelaku usaha tanaman pangan
- 9) Terlatihnya 18.540 pelaku usaha tanaman pangan tentang budidaya tanaman pangan
- 10) Tersalurkannya bantuan prasarana jalan usaha tani tanaman pangan kepada 81/kelompok tani/pelaku usaha
- 11) Tersalurkannya bantuan benih tanaman pangan ke 10 kelompok tani/pelaku usaha
- 12) Tertanganinya kasus serangan OPT tanaman pangan sebesar 20%
- 13) Terbinanya 12 pelaku usaha hortikultura dan perkebunan
- 14) Terlatihnya 4 pelaku usaha tanaman pangan tentang budidaya hortikultura dan perkebunan

- 15) Tersalurkannya bantuan prasarana jalan usaha tani/ produksi hortikultura dan perkebunan ke 13 kelompok
- 16) Tersalurkannya bantuan prasarana jaringan irigasi usaha tani hortikultura dan perkebunan ke 24 kelompok
- 17) Terbangunnya UPH untuk 2 kelompok
- 18) Tersalurkannya bantuan alat mesin pertanian hortikultura dan perkebunan ke 9 kelompok
- 19) Tersalurkannya bantuan alat pertanian hortikultura dan perkebunan skalakecil ke 92 kelompok
- 20) Tersalurkannya bantuan benih hortikultura dan perkebunan ke 21 kelompok
- 21) Tersalurkannya bantuan sarana produksi untuk hortikultura lainnya ke 9 kelompok
- 22) Tersalurkannya bantuan sarana produksi untuk perkebunan lainnya ke 98 pelaku usaha
- 23) Terpromosikannya produk hortikultura dan perkebunan pada 2 event tingkat kabupaten
- 24) Terpantaunya potensi serangan OPT hortikultra dan perkebunan di 960 Ha
- 25) Tertanganinya kasus serangan OPT hortikultura dan perkebunan sebesar 3%
- 26) Terbinanya 50 pelaku usaha peternakan
- 27) Terlatihnya 50 pelaku usaha tentang budidaya ternak
- 28) Tersedianya 909.000 ekor benih ikan hasil perbenihan
- 29) Tersedianya 9 ekor benih ternak hasil perbenihan
- 30) Tersedianya 39.000 kg benih tanaman pangan dan hortikultura hasil perbenihan
- 31) Terlayaninya 21% permohonan pemotongan hewan
- 32) Terpeliharanya 2 jenis sarana prasarana pasar ternak
- 33) Terbinanya pedagang sebesar 95%
- 34) Tersosialisasikan pasar ternak ke pedagang sebesar 90%

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas pelaku usaha perikanan
2. Meningkatkan pemanfaatan sarana perikanan
3. Meningkatkan pemanfaatan sarana perikanan tangkap
4. Meningkatkan kualitas budidaya perikanan

5. Meningkatkan nilai tambah dan akses pemasaran hasil perikanan
6. Meminimalisir risiko bencana perikanan
7. Meningkatkan produktivitas pelaku usaha tanaman pangan
8. Meningkatkan pemanfaatan prasarana tanaman pangan
9. Meningkatkan pemanfaatan sarana tanaman pangan
10. Meningkatkan nilai tambah dan akses pemasaran hasil tanaman pangan
11. Meminimalisir risiko serangan tanaman pangan
12. Meningkatkan produktivitas pelaku usaha hortikultura dan perkebunan
13. Meningkatkan pemanfaatan prasarana hortikultura dan perkebunan
14. Meningkatkan pemanfaatan sarana hortikultura dan perkebunan
15. Meningkatkan kualitas budidaya hortikultura dan perkebunan
16. Meningkatkan nilai tambah dan akses pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan
17. Meminimalisir risiko serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) hortikultura dan perkebunan
18. Meningkatkan produktivitas pelaku peternakan
19. Meningkatkan pemanfaatan sarana peternakan
20. Meningkatkan kualitas budidaya peternakan
21. Meningkatkan nilai tambah dan akses pemasaran hasil peternakan
22. Meningkatkan kesehatan hewan
23. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner
24. Meningkatkan produksi benih ikan
25. Meningkatkan produksi benih ternak
26. Meningkatkan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura
27. Meningkatkan kualitas pelayanan pemotongan hewan
28. Meningkatkan kualitas pelayanan pemasaran ternak

6) Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Tabel 3.13.

Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1

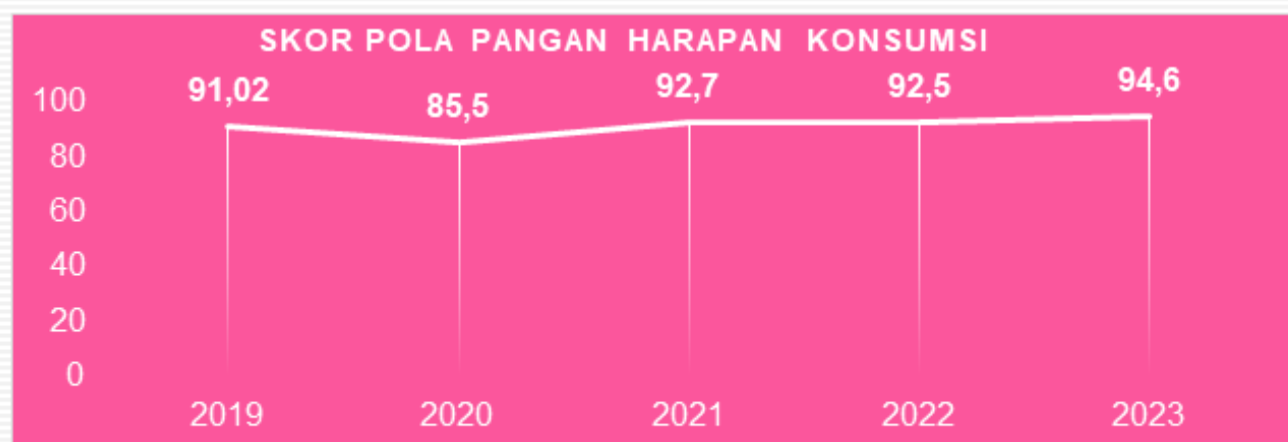
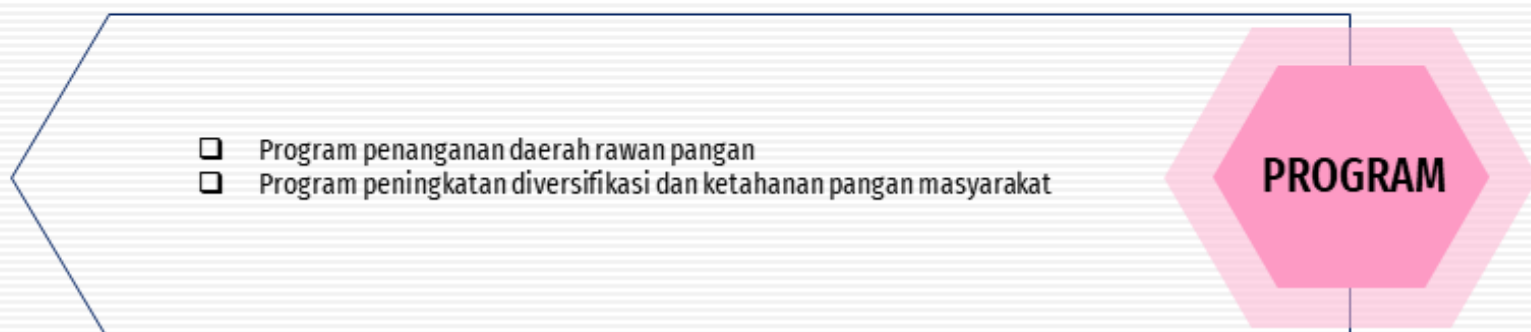
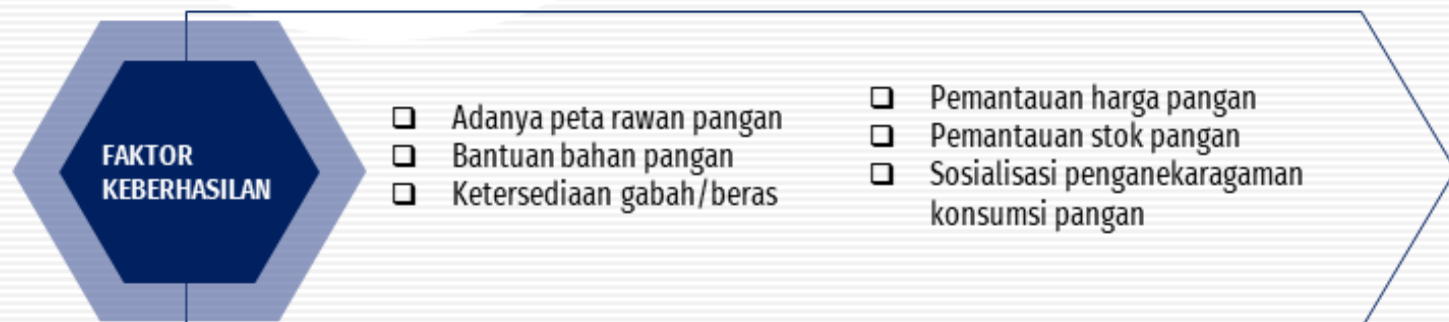
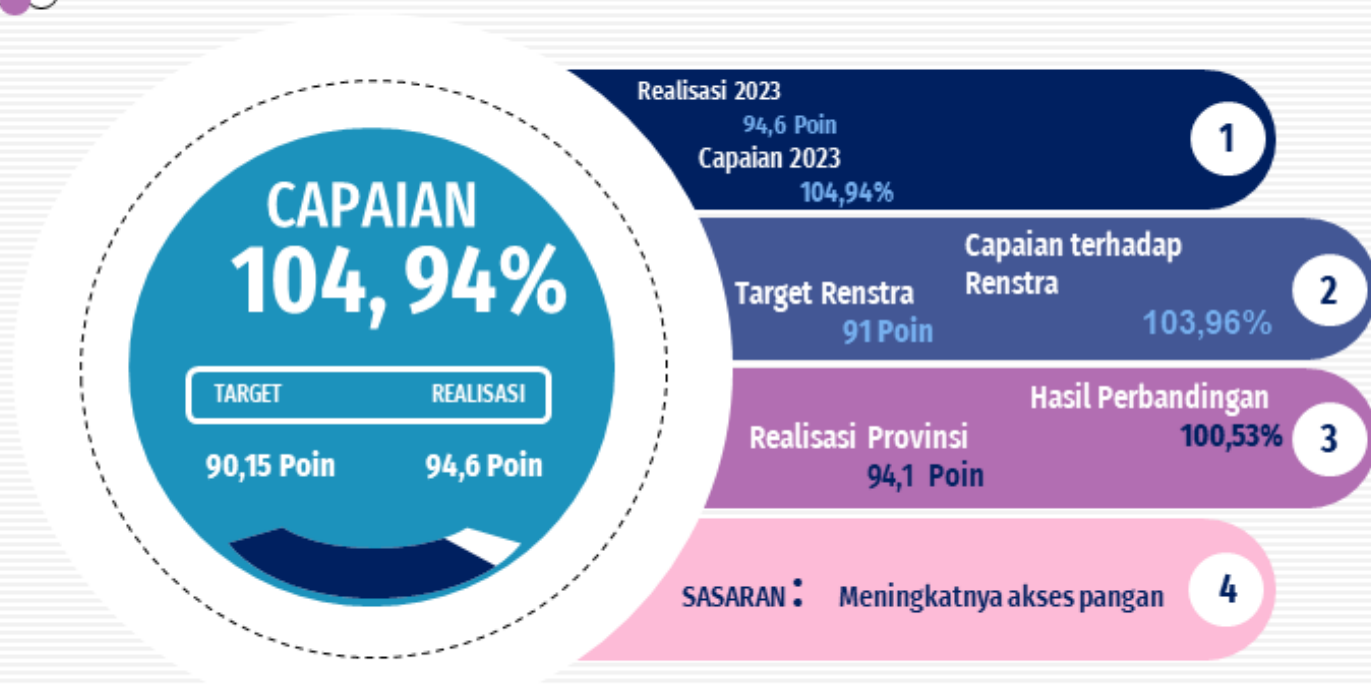
No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Bidang Perikanan	217.192.400
2.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Perikanan	86.280.000
3.	Penyediaan dan	Bidang	5.102.425.212

	Pengembangan Sarana Pertanian	Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan	
4.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Hortikultura Perkebunan	22.269.220.440
5.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	301.150.000
6.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Bidang Tanaman Pangan	45.000.000
7.	Penyuluhan Pertanian	Bidang Penyuluhan	1.295.480.000

7) Efisiensi

Efisiensi atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan pada sasaran Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (*off farm*) komoditas pertanian yaitu 4,65% atau sebesar Rp 1.363.045.416 dari pagu anggaran Rp 29.316.748.052 dengan realisasi Rp 27.953.702.636,00.

SKOR POLA PANGAN HARAPAN KONSUMSI



Sasaran Strategis 2 Indikator 1
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

1) Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Tabel 3.2.
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja
Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,15 Poin	94,6 Poin	104,94%

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Salah satu arah kebijakan pembangunan pangan dan pertanian dalam RPJMN 2020-2024 adalah Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dinilai dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH maksimal adalah 100. Pendekatan yang dilakukan untuk justifikasi penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah dengan menggunakan rasio pengeluaran riil setiap kelompok pangan. Pengeluaran riil dihitung berdasarkan pengeluaran nominal kelompok pangan yang dikoreksi dengan Indek Harga Konsumen. Angka IHK yang digunakan merupakan IHK rata-rata dari IHK setiap bulan selama satu tahun.

Sasaran strategis “meningkatkan akses pangan” dengan indikator kinerja “Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi” dari target yang ditetapkan yaitu 90,15 Poin terealisasi sebesar 94,6 Poin atau capaian kinerja sebesar 104,94%. Penilaian skor PPH dikategorikan menjadi empat, yaitu: sangat rendah (<55%), rendah (55-69%), cukup (70-84%) dan baik (>85%). Jadi, realisasi skor pola pangan harapan sebesar 94,6 Poin dinilai baik.

Pencapaian realisasi capaian kinerja sebesar 104,38 % tersebut diperoleh melalui dilaksanakannya beberapa kegiatan antara lain :

- a) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan , yang dilaksanakan dalam bentuk Fasilitasi bantuan bahan pangan berupa beras sebanyak 600 kg untuk sasaran penerima 60 orang masing-masing 10 kg/orang (keluarga stunting). Pelaksanaan bantuan bahan pangan

tersebut bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten Majalengka pada waktu kegiatan monev PKK tahun 2023 di 26 kecamatan, yang dilaksanakan dengan sasaran Terlaksananya fasilitasi bantuan bahan pangan untuk intervensi daerah rentan pangan, yang dilaksanakan dengan berlokasi di di 26 Desa Monev Tim PKK Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- b) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota , yang dilaksanakan dalam bentuk Fasilitasi bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa gabah sebanyak 4 ton masing-masing 2 ton yaitu untuk LPM Mulyasari Desa Jagamulya Kecamatan Malausma dan LPM Tegal Cau Desa Cigaleuh Kecamatan Lemahsugih, Cetak Buku Pengelolaan LPM sebanyak 95 buku, Penjilidan Juknis 5 buku dan Laporan Akhir Kegiatan 5 buku dan belanja fotocopy 375 lembar, yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatnya stok ketersediaan cadangan pangan di masyarakat, yang dilaksanakan dengan berlokasi di Desa rentan pangan prioritas 1-3 sebanyak 4 desa/ 4 kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) Kecamatan Lemahsugih Desa Cigaleuh dan Kecamatan Malausma Desa Jagamulya.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- c) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yang dilaksanakan dalam bentuk Monitoring Ketersediaan, Harga dan Pasokan Pangan ke Pasar yang ada di Kabupaten Majalengka, yang dilaksanakan dengan sasaran Tersedianya Laporan Ketersediaan, Harga dan Pasokan Pangan selama 12 Bulan, yang dilaksanakan dengan berlokasi di Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- d) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota, yang dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dan monitoring Kelompok LPM dan Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2023 dengan sasaran Terjaminnya ketersediaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten selama 12 Bulan, yang dilaksanakan dengan berlokasi di Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- e) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota sub kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, yang dilaksanakan dalam bentuk Pengadaan Gabah untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan sasaran Terjaminnya ketersediaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten sebanyak 20 ton gabah , yang dilaksanakan dengan berlokasi di Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :



- f) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, yang dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi Menu B2SA (Beragam, bergizi, Seimbang dan Aman) ke siswa Sekolah Dasar, mengikuti Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS), pengadaan benih untuk Desa Monev PKK dan bekerjasama dengan TP-PKK Kabupaten dalam Kegiatan AKU HATINYA (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman) PKK dengan sasaran Peningkatan Skor PPH sebesar 0,41%, yang dilaksanakan dengan berlokasi di Kabupaten Majalengka.

Sebagai gambaran visualisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :





2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022
Indikator Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,6 Poin	92,5 Poin	2,1

Tabel 3.4.

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dan Tahun 2022
Indikator Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	104,94%	100%	4,94%

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan realisasi indikator sasaran strategis antara tahun 2023 dengan tahun 2022 diperoleh hasil bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 94,6 poin mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 92,5 poin.

Adapun berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan capaian indikator sasaran strategis antara tahun 2023 dengan tahun 2022 diperoleh hasil bahwa capaian tahun 2023 sebesar 104,94% mengalami peningkatan sebesar 4,94% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.5.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra
Indikator Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,6 Poin	91 Poin	103,96%

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan terhadap perbandingan realisasi indikator sasaran strategis pada tahun 2023 dengan target akhir Renstra diperoleh hasil bahwa realisasi pada tahun 2023 adalah 103,96% dari target akhir Renstra, dengan demikian realisasi tahun 2023 lebih dari target akhir Renstra.

Dengan realisasi tahun 2023 lebih dari target akhir Renstra maka bagi penyusunan perencanaan Pembangunan tahap selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan angka target indikator kinerja sasaran perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang mencakup produktivitas, kualitas kerja, kemampuan kerja, ketepatan waktu.

4) Perbandingan Realisasi 2023 dengan Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional

Tabel 3.6.

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Rata-Rata/Standar
Provinsi/Nasional Indikator Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,6 Poin	94,1 Poin	100,53%

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional diperoleh hasil bahwa realisasi tahun 2023 adalah 100,53% dari Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional, dengan demikian realisasi tahun 2023 diatas Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional.

Angka realisasi yang nilainya diatas Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Majalengka dalam rangka mewujudkan target kinerja “Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi” sudah cukup berhasil.

5) Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Dari hasil tersebut dapat dirumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya peta rawan pangan sebanyak 1 buah
- 2) Diterapkannya SKPG sebanyak 1 buah
- 3) Berkurangnya daerah rawan sebesar 50%
- 4) Tersalurkannya bantuan bahan pangan ke 2 desa
- 5) Tersedianya gabah/beras untuk cadangan pangan sebanyak 3 ton
- 6) Terpantaunya harga pangan di 10 petani
- 7) Terpantaunya stok pangan di 10 petani
- 8) Tersosialisasikannya penganekaragaman konsumsi pangan ke 600 orang
- 9) Terseleksinya menu BS2A terbaik sebanyak 600 orang
- 10) Terbinanya 33 orang pelaku usaha tentang keamanan PSAT
- 11) Terujinya 33 sampel PSAT untuk keamanan pangan di laboratorium
- 12) Terpantaunya PSAT di 33 orang pelaku usaha
- 13) Terlayaninya permohonan registrasi PSAT sebesar 36%

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya ialah sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian distribusi pangan
2. Meminimalisir daerah rawan pangan
3. Meningkatkan konsumsi pangan
4. Meningkatkan keamanan pangan segar asal tumbuhan

6) Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Tabel 3.7.

Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2

No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1.	Program Penanganan Daerah Rawan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	38.000.000
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Bidang Ketahanan Pangan	147.500.000

7) Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi pada sasaran meningkatnya akses pangan

yaitu 1,94% atau sebesar Rp 3.604.500 dari pagu anggaran Rp 185.500.000 dengan realisasi Rp 181.895.500,00.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Akuntabilitas Keuangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya produktivitas (<i>on farm</i>) dan daya serap (<i>off farm</i>) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	100%	95,35%
2	Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	104,94%	98,06%

BAB 4

KESIMPULAN

Program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan sumber dana APBD Kabupaten adalah sebanyak 10 (sepuluh) program yaitu : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Penanganan Kerawanan Pangan, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian.

Sasaran strategis yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu : Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian, dengan indikator Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1,75 %, dan Meningkatnya akses pangan, dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 90,15 Poin

Pencapaian target indikator sasaran strategis dapat direalisasikan sesuai dengan target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian bukan berarti tidak ada kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehingga terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena dapat menghambat pencapaian target indikator kinerja, diantaranya :

- (1) Keterbatasan anggaran pembangunan yang menyebabkan alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan ideal sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan (ingin dicapai).
- (2) Faktor hambatan teknis atau non teknis dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan tidak bisa direalisasikan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran pembangunan disebabkan adanya kebijakan realokasi anggaran terhadap fokus prioritas Pembangunan.
- b. Perlu adanya penajaman fokus program dan kegiatan pembangunan yang sinergi dengan melibatkan berbagai stakeholder sehingga dampak dari program dan kegiatan pembangunan dapat lebih maksimal dan nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
- c. Belum terwujudnya sinergitas yang optimal diantara berbagai program/kegiatan serta berbagai stakeholders yang terlibat.
- d. Belum maksimalnya pembinaan dan bimbingan teknis terhadap masyarakat/sasaran kegiatan yang menyebabkan sikap mental dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) masyarakat belum terbangun secara baik sehingga menyebabkan dampak dari adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sesaat (setelah kegiatan selesai tidak ada tindak lanjut).
- e. Masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang menjadi faktor penghambat dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- f. Guna mewujudkan keberhasilan program/kegiatan maka dalam pelaksanaannya perlu adanya keterpaduan antara adopsi dan pengembangan teknologi serta budaya tani masyarakat. Ketidakselarasan antara tingkat adopsi dan pengembangan teknologi dengan tingkat budaya tani menyebabkan keberlanjutan dari hasil

program/kegiatan tidak terwujud, menyebabkan dampak dari telah dilaksanakannya program/kegiatan tidak terasa.

Dalam rangka memecahkan kendala-kendala tersebut maka perlu diambil beberapa langkah pemecahan antara lain :

- a. Perlu upaya penggalan sumber-sumber dana pembangunan, baik yang berasal dari provinsi/pusat, bantuan luar negeri ataupun peran swasta serta swadaya dan swadaya masyarakat.
- b. Perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sehingga dapat menciptakan daya dorong (*trigger efect*) yang dapat menggerakkan kemandirian masyarakat dalam membangun. Hal ini sesuai dengan tujuan dari digulirkannya program/kegiatan pembangunan yaitu untuk memberikan stimulus untuk menciptakan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian dampak dari pelaksanaan program/kegiatan akan terwujud secara nyata yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi terwujudnya capaian kinerja hasil pembangunan yang maksimal.
- c. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perlu ditunjang dengan keberlanjutan program di tahun-tahun sel anjutnya sekaligus diikuti dengan bimbingan lanjutan secara intensif sehingga jiwa kewirausahaan di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud.
- d. Perlu dilakukannya penelaahan dan pengkajian lebih mendalam dan komprehensif terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada saat penyusunan rencana program dan kegiatan sebagai langkah antisipasi terhadap hambatan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. IMAN FIRMANSYAH, M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Majalengka, Oktober 2023

Pihak Pertama,



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	1,75 %
2.	Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,15 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 217.192.400,00	APBD
2. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 1.295.480.000,00	APBD
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 22.269.220.400,00	APBD
4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 5.102.425.212,00	APBD
5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 45.000.000,00	APBD
6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 86.280.000,00	APBD
7. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 301.150.000,00	APBD
8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KANUPATEN / KOTA	Rp 29.281.810.044,00	APBD
9. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 147.500.000,00	APBD
10. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 38.000.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 58.784.058.056,00	


 Bupati Majalengka,
Dr. H. ERNE SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Oktober 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,


IRFAN FIRMANSYAH, M.M.
 NIP. 19680502 199803 1 009

Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian

IK : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

IK : Nilai SAKIP Perangkat Daerah : BB

IK : Nilai IKM Perangkat Daerah : B

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan								Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	
IK: Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan = > 90 %	IK: Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu = ≥ 90 %	IK: Persentase SPM yang menjadi SP2D tepat waktu = 100 %	IK: persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya = 100 %	IK: Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu = 100 %	IK: Persentase aset yang tercatat = 100 %	IK: Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu = 100 %	IK: Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi = ≥ 90 %	IK: Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik = ≥ 90 %			IK: Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik = 100 %	IK: Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan = 100 %	IK: Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani = 100 %	IK: Persentase pelayanan administrasi Surat Menyurat yang tepat waktu = 100 %	IK: Persentase peningkatan nilai IKM = 0,10 % - 0,50 %
Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan		Tersusunya Laporan Keuangan	Tersusunnya neraca aset	Tertanganinya permohonan layanan kepegawaian	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya Layanan Internet	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Tertanganinya permohonan data dan informasi	Tertanganinya permohonan administrasi surat menyurat	Tersusunnya laporan IKM Perangkat Daerah
IK: Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun = 2 Dokumen	IK: Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan = 364 Orang	IK: Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D = 100 %	IK: jumlah kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya = 22 Buah	IK: Jumlah Laporan Keuangan = 1 Laporan	IK: Jumlah Aset yang tercatat = 1 Paket	IK: Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian = 364 Orang	IK: Jumlah ASN yang terlatih = 55 orang	IK: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan = 5.644 Unit/Jenis			IK: Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet = 9 Paket	IK: Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor = 18 Unit	IK: Persentase permohonan data dan informasi yang tertangani = 60 Persen	IK: Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani = 60 Persen	IK: Jumlah laporan IKM Perangkat Daerah yang disusun = 1 Laporan
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTER AN SKPD	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTER AN SKPD	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTER AN SKPD			SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR		SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	
Anggaran : Rp. 11.190.634	Anggaran : Rp. 24.961.220.135	Anggaran : Rp. 1.740.000	Anggaran : Rp. 1.740.000	Anggaran : Rp. 1.740.000	Anggaran : Rp. 1.740.000			Anggaran : Rp. 35.000.000,-	Anggaran : Rp. 150.000.000,-	Anggaran : Rp. 32.898.750,-	Anggaran : Rp. 316.402.000	Anggaran : Rp. 474.552.000		Anggaran : Rp. 11.190.634	
Tersusunnya Dokumen PK						Terpeliharanya sarana dan prasarana			Tersedianya layanan telepon	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor					
IK: Jumlah dokumen PK = 2 Dokumen						IK: Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara = 1.971 Unit/paket			IK: Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon = 1 Paket	IK: Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor = 18 Unit					

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
Anggaran : Rp. 11.190.634

Tersusnya Dokumen LKIP
IK: Jumlah dokumen LKIP = 1 Dokumen
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Anggaran : Rp. 11.160.000

Tereviewnya Dokumen Renstra
IK: Jumlah dokumen Renstra yang tereview = 1 Dokumen
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
Anggaran : Rp. 11.190.634

Tersusnya cascading
IK: Jumlah dokumen cascading yang tersusun = 1 Dokumen

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
Anggaran : Rp. 20.000.000	Anggaran : Rp. 115.000.000	Anggaran : Rp. 56.250.000	Anggaran : Rp. 316.402.000	Anggaran : Rp. 474.552.000

Terpeliharanya kendaraan dinas	Tersedianya layanan listrik
IK: Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik = 111 Unit	IK: Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik = 4 Paket
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Anggaran : Rp. 155.639.000	Anggaran : Rp. 316.402.000

Terpenuhinya kebutuhan air
IK: Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air = 5 Paket
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Anggaran : Rp. 316.402.000

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
Anggaran : Rp. 11.190.634

Tereviewnya pohon kinerja
IK: Jumlah dokumen pohon kinerja yang tereview = 1 Dokumen

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
Anggaran : Rp. 11.190.634

Tereviewnya rencana aksi
IK: Jumlah dokumen rencana aksi yang tereview = 1 Dokumen

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
Anggaran : Rp. 11.190.634

Tersusunnya dokumen RKA
IK: Jumlah dokumen RKA yang tersusun = 1 Dokumen

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD
Anggaran : Rp. 9.240.000

Tersusunnya dokumen Perubahan RKA
--

IK: Jumlah dokumen Perubahan RKA yang tersusun = 1 Dokumen
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD
Anggaran : Rp. 5.040.000

Tersusunnya dokumen DPA
IK: Jumlah dokumen DPA yang tersusun = 1 Dokumen
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD
Anggaran : Rp. 5.040.000

Tersusunnya dokumen RUP
IK: Jumlah dokumen RUP yang tersusun = 1 Dokumen
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
Anggaran : Rp. 11.190.634

Tersusunnya dokumen Laporan Pengukuran Kinerja
IK: Jumlah dokumen Laporan Pengukuran Kinerja yang tersusun = 1 Dokumen

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Anggaran : Rp. 16.080.000

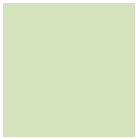
Tereviewnya dokumen profil perangkat daerah
IK: Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang tereview = 1 Dokumen
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Anggaran : Rp. 11.160.000

Tersusunnya dokumen LPPD
IK: Jumlah dokumen LPPD yang tersusun = 1 Dokumen
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Anggaran : Rp. 11.160.000



Majalengka, Juli 2023
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Ir. IMAN FIRMANSAH, MM.
NIP. 19680502 199803 1 009



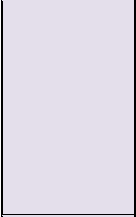
Meningkatnya kualitas implementasi RB Perangkat Daerah

IK: Persentase peningkatan nilai RB Perangkat Daerah 0,001 %

0,001

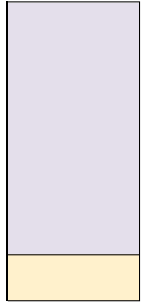
Terlaksananya PMPRB Perangkat Daerah

IK: Jumlah evidence PMPRB yang terpenuhi = 1 Paket



Terciptanya inovasi Perangkat Daerah

IK: Jumlah inovasi yang tercipta



CASCADED DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALINGGA TAHUN 2023
PENYELARASAN POHON KNERJA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

Summary table with 4 columns: Indikator, Sasaran, Monev, and Indikator. Rows include 'Meningkatkan produksi/pelaku usaha pertanian', 'Meningkatkan pemanfaatan prasarana pertanian', 'Meningkatkan kualitas hasil budidaya perikanan', and 'Meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku usaha perikanan'.

Matrix table with 4 columns and 18 rows. Column headers: Indikator, Sasaran, Monev, and Indikator. Rows describe various agricultural programs and their associated indicators and targets.

Table 1: Detailed indicators for agricultural production and infrastructure. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like crop production, irrigation infrastructure, and agricultural machinery.

Table 2: Detailed indicators for fishery and aquaculture. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish production, aquaculture, and fish processing.

Table 3: Detailed indicators for farmer welfare and extension. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like farmer income, extension services, and farmer organizations.

Table 4: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 5: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 6: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 7: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 8: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 9: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 10: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 11: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 12: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 13: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 14: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 15: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 16: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 17: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Table 18: Detailed indicators for fishery infrastructure and services. Includes columns for 'Indikator', 'Sasaran', and 'Monev'. Rows cover topics like fish landing infrastructure, fish health services, and fish marketing.

Meningkatnya produksi bibit ternak	Meningkatnya produksi bibit tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya kualitas pakan dan pemeliharaan ternak	Meningkatnya kualitas pakan dan pemeliharaan ternak
Perentase peningkatan produksi bibit ternak = 2,5 Persen	Perentase peningkatan produksi bibit ternak tanaman pangan dan hortikultura = 3,3 Persen	KM pemeliharaan ternak = 71 Persen	KM pemeliharaan ternak = 75 Persen
Kepala LPT BPPT	Kepala LPT BPTN	Kepala LPT BPN	Kepala LPT PIR
PROGRAM PENYELATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYELATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYELATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYELATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Meningkatnya kualitas perbibitan ternak	Meningkatnya hasil ta x perbibitan ta tanaman pangan dan hortikultura	Perawatan hewan sesuai dengan standar	Meningkatnya kualitas tata laksana pakan ternak
Perentase bibit ternak yang memenuhi standar mutu = 100 Persen	Perentase bibit tanaman pangan dan hortikultura yang memenuhi standar mutu = 100 Persen	Perentase pemeliharaan peromohonan ternak dan hewan yg terlayak pemeliharaan ternak = 100 Persen	Perentase pedagang ternak yg terlayak pemeliharaan ternak = 100 Persen
Kepala LPT BPPT	Kepala LPT BPTN	Kepala LPT BPN	Kepala LPT PIR
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU DAN PENYELATAN BINTIK BINTIK TERNAK DAN TANAMAN POKOK TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	KEGIATAN PENGELOMPOKAN SARANA DAN GINERVA (SOS) HEWAN, TANAMAN, DAN MANUSIA DALAM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	KEGIATAN PENGEMBANGAN PROGRAM PEMERIKHAAN	KEGIATAN PENGEMBANGAN PROGRAM PEMERIKHAAN

Terdapatnya bibit ternak hasil perbibitan	Terdapatnya bibit tanaman pangan dan hortikultura hasil perbibitan	Terdapatnya pemeliharaan peromohonan ternak	Terdapatnya sarana prasarana pakan ternak
Jumlah bibit ternak = 20 ekor	Jumlah bibit tanaman pangan dan hortikultura = 20.000 kg	Perentase pemeliharaan peromohonan ternak dan hewan yg terlayak = 100 Persen	Jumlah sarana prasarana ternak yang terlayak = 2 jenis/lot
Anggota Tim : Kepala Sub Bagian TU LPT BPPT	Anggota Tim : Kepala Sub Bagian TU LPT BPTN	Anggota Tim : Kepala Sub Bagian TU LPT BPN	Anggota Tim : Kepala Sub Bagian TU LPT PIR
SUB KEGIATAN PENYELATAN MUTU BINTIK BINTIK TERNAK DAN TANAMAN POKOK TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	SUB KEGIATAN PENYELATAN MUTU BINTIK BINTIK TERNAK DAN TANAMAN POKOK TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	SUB KEGIATAN PENYELATAN MUTU BINTIK BINTIK TERNAK DAN TANAMAN POKOK TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	SUB KEGIATAN PENYELATAN MUTU BINTIK BINTIK TERNAK DAN TANAMAN POKOK TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Anggaran : Rp. 748.000.000	Anggaran : Rp. 450.000.000	Anggaran : Rp. 0	Anggaran : Rp. 0

Terdapatnya pedagang ternak	Terdapatnya pedagang ternak yg terlayak di pasar ternak	Terdapatnya pedagang ternak yg terlayak di pasar ternak	Terdapatnya pedagang ternak yg terlayak di pasar ternak
Jumlah pedagang ternak = 80 Persen	Jumlah pedagang ternak yg terlayak di pasar ternak = 80 Persen	Jumlah pedagang ternak yg terlayak di pasar ternak = 80 Persen	Jumlah pedagang ternak yg terlayak di pasar ternak = 80 Persen
Anggota Tim : Kepala Sub Bagian TU LPT PIR	Anggota Tim : Kepala Sub Bagian TU LPT PIR	Anggota Tim : Kepala Sub Bagian TU LPT PIR	Anggota Tim : Kepala Sub Bagian TU LPT PIR
SUB KEGIATAN PENYELATAN MUTU BINTIK BINTIK TERNAK DAN TANAMAN POKOK TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	SUB KEGIATAN PENYELATAN MUTU BINTIK BINTIK TERNAK DAN TANAMAN POKOK TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	SUB KEGIATAN PENYELATAN MUTU BINTIK BINTIK TERNAK DAN TANAMAN POKOK TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	SUB KEGIATAN PENYELATAN MUTU BINTIK BINTIK TERNAK DAN TANAMAN POKOK TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Anggaran : Rp. 0	Anggaran : Rp. 0	Anggaran : Rp. 0	Anggaran : Rp. 0



 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

 Juli 2023

 Pungki, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

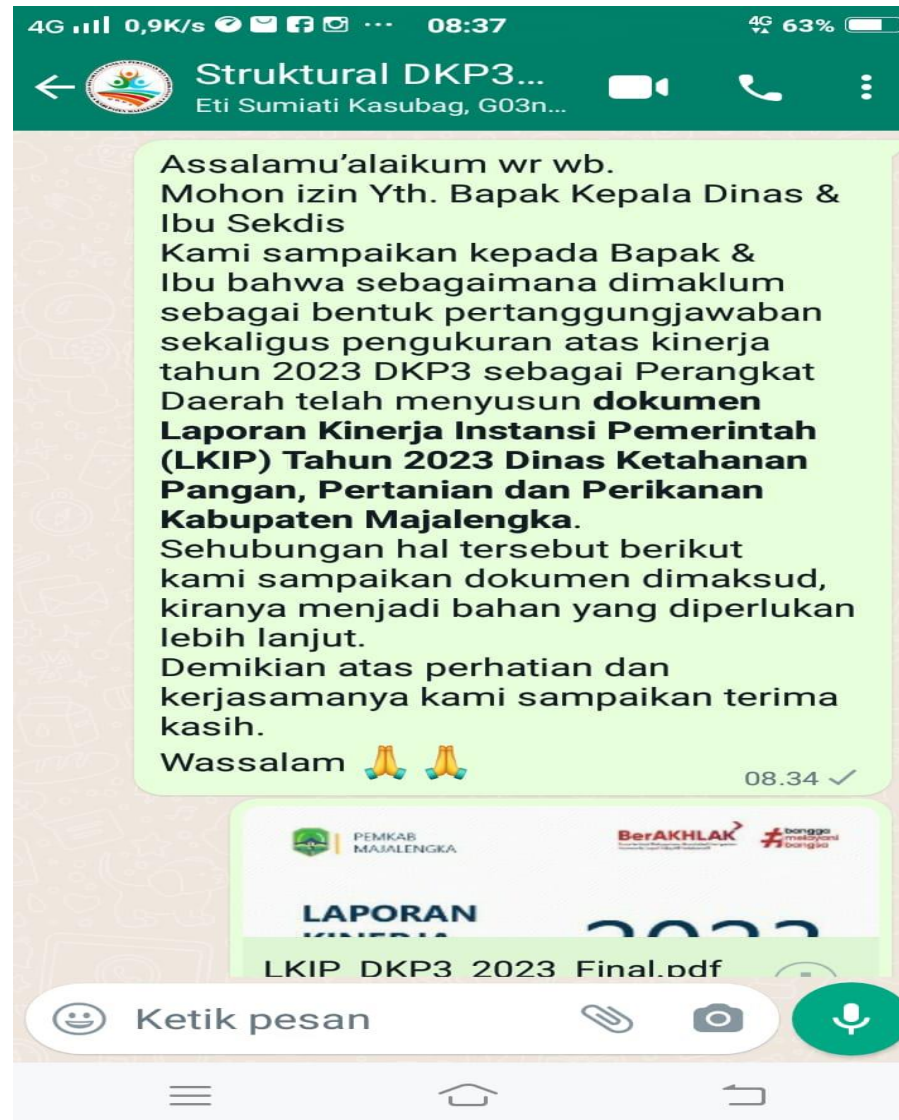
 PIRANAN, MM.

 5680502 199803 1 000

BUKTI SEBAR LKIP TAHUN 2023

KEPADA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUP DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN MAJALENGKA



TABEL
PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023

NO.	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	URAIAN
1	Juara Harapan I Tingkat Nasional Kelompok Masyarakat Pengawas MR. PALA Rajagaluh	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sebelumnya tahun 2021 Juara I Pokmaswas Tigkat Provinsi Jawa Barat
2	Juara 1 Tingkat Nasional Petugas Informasi Pasar an. Irma Damai Harti, S.Pt.	Kementerian Pertanian RI Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sebelumnya tahun 2022 Juara I PIP Petugas Tigkat Provinsi Jawa Barat
3	Juara 1 Kontes Ternak dan EXPO Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Kategori Kontes Ternak Ayam Sentul- Kategori Raja Pejantan Umur 12-15 Bulan an. Ahmad Sukron	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Peternak merupakan salah satu Petani Milenial Bidang Peternakan di Kecamatan Palasah
4	Juara 3 Kontes Ternak dan EXPO Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Kategori Kontes Ternak Ayam Sentul- Kategori Ratu Bibit Umur 9-12 Bulan an. Hera Herawan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	Peternak merupakan salah satu Petani Milenial Bidang Peternakan di Kecamatan Ligung
5	Penyuluh Favorit dalam Kompetisi IOT Smart Farming Petani Milenial Provinsi Jawa Barat	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	
6	Peringkat Harapan II Loma Aparatur dan Non Aparatur Pertanian Berprestasi Kategori Petani Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	Gubernur Jawa Barat	





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Alamat Jl. K. H. Abdul Halim No. 31 Telp. (0233) 281545 Fax. (0233) 281636
Website <http://distan.majalengkakab.go.id> email: dkp3majalengka@gmail.com
MAJALENGKA 45417

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : KP.12.42/08/Sekret

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan, Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa mengacu kepada pokok uraian sebagaimana tercantum dalam huruf b maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka diminta untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2023;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- Tahun 2014 Nomor 80);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
 14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembar Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka;
25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);

26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
27. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
28. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Nomor : KP.12.42/24/Sekret tanggal 10 Agustus 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
29. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Nomor : tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
30. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia dan Uraian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- b. Menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- c. Menyusun materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023;

d. Melakukan

- d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- e. Melaksanakan pendistribusian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Majalengka;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Majalengka



Dr. IMAN FIRMANSYAH, MM.
NIP. 19680502 199803 1 009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : **KP.12.42/08/Sekret**

Tanggal : **04 Januari 2024**

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2023**

**I. SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023**

Penanggungjawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Ketua Pelaksana : Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Sekretaris : Fungsional Perencana pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Koordinator Tim Bidang Ketahanan Pangan : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Koordinator Tim Bidang Tanaman Pangan : Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Majalengka

Anggota : 1. Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Majalengka
2. Kepala, Kasubbag TU dan Pelaksana pada UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Koordinator Tim Bidang Hortikultura dan Perkebunan : Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Anggota :

- Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Koordinator Tim Bidang Perikanan : Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
2. Kepala, Kasubbag TU dan Pelaksana pada UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (BBPPI) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Koordinator Tim Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
2. Kepala, Kasubbag TU dan Pelaksana pada UPT Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan (UPTD PTR dan RPH) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
3. Kepala, Kasubbag TU dan Pelaksana pada UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (BPPPT) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Koordinator Tim Bidang Penyuluhan : Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Koordinator Tim Penyusunan Bahan / Editing dan Penyelarasan Laporan : Fungsional Perencana pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Anggota : Pelaksana pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

- Koordinator Tim Kesekretariatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
2. Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
3. Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

II. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

1. PENANGGUNGJAWAB :

- a. Memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- b. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- c. Menandatangani dan Menetapkan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

2. KETUA PELAKSANA :

- a. Membantu Penanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- d. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang penyusun materi
- e. Memberikan pelayanan kepada seluruh tim bidang penyusun materi
- f. Menyusun Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- g. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

- h. Membuat laporan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan petunjuk dan arahan Penanggungjawab

3. SEKRETARIS :

- a. Membantu Ketua pelaksanaan dalam hal pengumpulan data guna Penulisan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- b. Membantu Ketua pelaksana dalam hal Penulisan dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- c. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

4. KOORDINATOR TIM BIDANG :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan materi/bahan/data Bidang sesuai dengan bidangnya

5. ANGGOTA PELAKSANA TEKNIS BIDANG :

- a. Membantu Koordinator Bidang selama melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

6. KOORDINATOR TIM PENYUSUNAN BAHAN / EDITING DAN PENYELARASAN LAPORAN :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan Materi/Bahan/Data Bidang penyusunan bahan/editing dan penyetaraan laporan.

7. ANGGOTA KOORDINATOR TIM PENYUSUNAN BAHAN / EDITING DAN PENYELARASAN LAPORAN :

- a. Membantu Koordinator Bidang Penyusunan Bahan/Editing/dan penyetaraan selama melaksanakan Penyusunan Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Bidang Penyusunan Bahan/Editing dan Penyetaraan Laporan dalam Penyusunan Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

8. KOORDINATOR TIM KESEKRETARIATAN :

Membantu Ketua Pelaksana selama melaksanakan Penyusunan Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dan bertanggungjawab mengkoordinasikan urusan kesekretariatan

9. ANGGOTA TIM KESEKRETARIATAN :

- a. Membantu Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan selama melaksanakan Penyusunan Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Koordinator Tim Bidang Kesekretariatan dalam Penyusunan Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 04 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Majalengka

Ir. IMAN FIRMANSYAH, MM.

NIP. 19680502 199803 1 009